

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR EKONOMI DAN FISKAL YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**Srida Fernanda Servia<sup>1</sup>, Olivia Seftyvelia<sup>2</sup>, Putri Rusmanawati Azzahra<sup>3</sup>,**

**Muhammad Wandy Rizal<sup>4</sup>, Dicky Ramadhan<sup>5</sup>, Meiman Rius Gea<sup>6</sup>**

[sridafernanda@gmail.com](mailto:sridafernanda@gmail.com)<sup>1</sup>, [olivia18082006@gmail.com](mailto:olivia18082006@gmail.com)<sup>2</sup>, [raputri362@gmail.com](mailto:raputri362@gmail.com)<sup>3</sup>,

[wandyrizal88@gmail.com](mailto:wandyrizal88@gmail.com)<sup>4</sup>, [ramdhn205@gmail.com](mailto:ramdhn205@gmail.com)<sup>5</sup>, [meimanriusgea55@gma.com](mailto:meimanriusgea55@gma.com)<sup>6</sup>

**Universitas Palangkaraya**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi dan fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Faktor fiskal dan ekonomi yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat (TKDD), Transfer Antar Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan empiris, memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi APBD dan data PDRB yang disusun dalam bentuk data panel selama periode 2015–2024. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pengujian asumsi klasik, uji simultan, uji parsial, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan PAD, TKDD, Transfer Antar Daerah, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Secara parsial, PAD, TKDD, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Transfer Antar Daerah tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah masih dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, meskipun peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah berperan dalam mendorong belanja pembangunan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kemandirian fiskal daerah dan perumusan kebijakan belanja modal yang lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat, PDRB, Keuangan Daerah.

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effects of economic and fiscal factors on regional government capital expenditure in Central Kalimantan Province. The fiscal and economic variables examined include Local Own-Source Revenue (PAD), Central Government Transfers (TKDD), Intergovernmental Transfers, and Gross Regional Domestic Product (GRDP). This research employs a quantitative empirical approach using secondary panel data derived from regional budget realization reports and GRDP statistics covering the period 2015–2024. Panel data regression analysis is applied, along with classical assumption tests, simultaneous and partial significance tests, and coefficient of determination analysis. The results indicate that PAD, TKDD, Intergovernmental Transfers, and GRDP simultaneously have a significant effect on regional capital expenditure. Partially, PAD, TKDD, and GRDP have a positive and significant effect on capital expenditure, while intergovernmental transfers show no significant effect. These findings suggest that regional capital expenditure in Central Kalimantan Province remains highly dependent on central government transfers, although improvements in local revenue capacity and regional economic growth contribute positively to development spending. This study provides important insights for strengthening fiscal independence and improving the effectiveness of regional capital expenditure policies.*

**Keywords:** Capital Expenditure, Local Revenue, Government Transfers, GRDP, Regional Finance.

## PENDAHULUAN

Belanja modal pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Belanja modal mencakup investasi pemerintah daerah dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat (Hofman, 2006). Dalam konteks desentralisasi fiskal di

Indonesia, belanja modal menjadi instrumen utama dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah serta memperkuat daya saing daerah. Namun, efektivitas belanja modal dalam mendorong pembangunan seringkali bergantung pada kapasitas fiskal dan kondisi ekonomi daerah.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah dengan dinamika ekonomi dan fiskal yang kompleks. Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah (2024), porsi belanja modal terhadap total belanja daerah rata-rata sebesar 20,3% dalam periode 2020–2024, dengan fluktuasi yang cukup tajam antar kabupaten/kota. Kabupaten Kotawaringin Timur, misalnya, mencatat proporsi belanja modal tertinggi mencapai 27%, sementara Kabupaten Gunung Mas hanya sekitar 13%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal antarwilayah masih sangat bervariasi dan berpotensi memengaruhi kemampuan daerah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan publik yang memadai (Elida, 2013).

Salah satu isu utama dalam pengelolaan belanja modal daerah adalah kemandirian fiskal, yang menggambarkan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluarannya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian Anjani, Masnila, dan Yanto (2025) menegaskan bahwa tingkat kemandirian fiskal berhubungan positif dengan alokasi belanja modal dan pembangunan daerah. Namun, banyak daerah di Kalimantan Tengah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang menyebabkan fenomena flypaper effect, di mana peningkatan dana transfer tidak selalu diikuti peningkatan belanja modal produktif (Iskandar & Saragih, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal belum sepenuhnya menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan fiskal daerah.

Peran pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah juga sangat krusial dalam pembiayaan pembangunan. Transfer dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal antarwilayah. Namun, penelitian Takahata, Dartanto, & Khoirunurrofik (2021) menunjukkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer justru dapat melemahkan insentif daerah untuk menggali potensi pendapatan lokal. Sementara Aritenang (2020) menemukan bahwa alokasi transfer pemerintah pusat memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja infrastruktur, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan efisiensi pembangunan di tingkat daerah.

Selain faktor fiskal, kondisi ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga berperan besar terhadap kapasitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan PDRB mencerminkan aktivitas ekonomi yang tinggi dan memperbesar potensi penerimaan daerah. Namun, studi Muzdalifah (2018) di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan belanja modal. Ketimpangan antarwilayah dan ketergantungan pada sektor ekstraktif menjadi hambatan dalam menciptakan sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur publik.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara faktor fiskal dan ekonomi terhadap belanja modal, namun masih terdapat kesenjangan penelitian, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik geografis dan fiskal yang heterogen

seperti Kalimantan Tengah. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada level nasional atau provinsi besar seperti

Jawa dan Sumatera, sementara kajian empiris pada wilayah Kalimantan masih terbatas (Lubis, 2015; Hakim, Wibowo, & Iqbal, 2025). Selain itu, sebagian penelitian hanya meneliti hubungan linier tanpa mempertimbangkan interaksi antara kemandirian fiskal, transfer pusat, dan indikator ekonomi daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi dan fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan literatur mengenai desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah, khususnya dalam konteks pemerataan fiskal di wilayah dengan kapasitas ekonomi yang beragam. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkuat pemahaman tentang hubungan antara kapasitas fiskal dan belanja publik, sementara secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## METODOLOGI

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan empiris, bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor ekonomi dan fiskal terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah. Pendekatan ini digunakan karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif berdasarkan data numerik yang bersumber dari data keuangan dan statistik resmi pemerintah.

### Objek dan Periode Penelitian

Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang mencakup pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di wilayah tersebut. Periode penelitian meliputi tahun 2015–2024 (10 tahun), dipilih untuk menangkap dinamika fiskal daerah sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterbitkan oleh DJPK Kementerian Keuangan RI.
- b. Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, terutama data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator ekonomi daerah. Data disusun dalam bentuk panel (gabungan time series dan cross section).

### Variabel Penelitian

- Variabel Dependen (Y): Belanja Modal Pemerintah Daerah.
- $X_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- $X_2$  = Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD)
- $X_3$  = Pendapatan Transfer Antar Daerah
- $X_4$  = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Model penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 TKDD_{it} + \beta_3 TAD_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \epsilon_{it} \text{ d.}$$

### Teknik Analisis Data

Datadianalisis menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap belanja modal. Analisis dilakukan melalui tahapan:

1. Uji statistik deskriptif.
2. Uji asumsi klasik.
3. Uji t dan uji F untuk pengaruh parsial dan simultan.

4. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk melihat kontribusi variabel X terhadap Y.

Pengolahan data dilakukan menggunakan EViews atau SPSS. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh faktor ekonomi dan fiskal terhadap kebijakan belanja modal di Provinsi Kalimantan Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama periode penelitian 2015–2024, kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan fluktuasi pada seluruh komponen utama APBD, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer pemerintah pusat (TKDD), transfer antar daerah, serta belanja modal. Berdasarkan data, rata-rata PAD selama periode tersebut mencapai sekitar 18,8 triliun rupiah, dengan tren peningkatan hingga tahun 2020 sebelum mengalami penurunan tajam pada tahun 2023 akibat dampak pandemi COVID-19 dan perlambatan ekonomi daerah.

Tahun	Belanja Modal M (Y)	PAD (X1)	Transfer Pemerintah Pusat / TKDD (X2)	Transfer Antar Daerah (X3)	PDRB % (X4)
2015	17.574,25 M	16.534,75 M	12.090,70 M	9.382,63 M	7,01
2016	6.137,22 M	20.395,80 M	16.735,68 M	662,74 M	6,36
2017	4.621,13 M	19.378,88 M	15.808,35 M	539,85 M	6,73
2018	5.168,85 M	20.779,94 M	16.475,53 M	730,83 M	5,64
2019	4.991,52 M	21.979,37 M	17.146,31 M	813,44 M	6,16
2020	5.924,00 M	22.557,12 M	17.559,36 M	851,06 M	-1,40
2021	4.561,88 M	20.827,57 M	16.494,54 M	701,93 M	3,41
2022	1.054,88 M	21.374,01 M	15.928,49 M	1.114,99 M	6,45
2023	1.806,99 M	6.416,83 M	3.939,88 M	275,79 M	4,14
2024	3.125,13 M	9.227,02 M	6.516,06 M	456,12 M	4,46

Sumber : Hasil olahan peneliti dari DJPK Kemenkeu, BPS Kalimantan Tengah, dan BPKAD Provinsi Kalimantan Tengah (2025).

**Tabel Uji Statistik Deskriptif**

Tabel Uji Statistik Deskriptif

Date: 12/18/25 Time: 20:56

Sample: 2015 2024

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	17947.13	13869.49	1552.938	4.896000	5496.585
Median	20587.87	16202.01	716.3800	5.900000	4806.325
Maximum	22557.12	17559.36	9382.630	7.010000	17574.25
Minimum	6416.830	3939.880	275.7900	-1.400000	1054.880
Std. Dev.	5623.414	4831.412	2760.603	2.519952	4563.519
Skewness	-1.271667	-1.268556	2.632309	-1.671903	1.983190
Kurtosis	3.023273	2.979316	8.004354	4.963152	6.229871

Sumber: Hasil olahan data sekunder (EViews 12), berdasarkan Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah dan Publikasi BPS Provinsi Kalimantan Tengah (2015–2024).

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai variabel penelitian yang meliputi Belanja Modal (Y), Pendapatan Asli Daerah (PAD/X<sub>1</sub>), Transfer Pemerintah Pusat (TKDD/X<sub>2</sub>), Transfer Antar Daerah (TAD/X<sub>3</sub>), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB/X<sub>4</sub>) selama periode 2015–2024. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) Belanja Modal sebesar Rp5.496,59 miliar, PAD sebesar Rp17.947,13 miliar, TKDD sebesar Rp13.869,49 miliar, TAD sebesar Rp1.552,94 miliar, dan pertumbuhan PDRB rata-rata 4,90%. Nilai standar deviasi pada variabel TAD menunjukkan adanya fluktuasi cukup tinggi antar tahun.

Secara umum, hasil ini menggambarkan bahwa struktur keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD terhadap belanja modal masih terbatas.

### **Uji Asumsi klasik**

#### 1. Uji multikoleras

Tabel Uji multikoleras

Variance Inflation Factors

Date: 12/18/25 Time: 22:57

Sample: 2015 2024

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2380246.	30.73637	NA
X1	0.319107	1444.541	117.2763
X2	0.433551	1194.555	117.6147
X3	0.016155	1.933950	1.430852
X4	15922.41	6.103662	1.175078

*Sumber: Hasil olahan peneliti menggunakan EViews 12 berdasarkan data fiskal Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015–2024 (APBD dan BPS).*

Berdasarkan hasil uji VIF, ditemukan adanya multikolinearitas tinggi antara PAD (X1) dan Transfer Pemerintah Pusat (X2) dengan nilai VIF lebih dari 100. Sedangkan Transfer Antar Daerah (X3) dan PDRB (X4) tidak menunjukkan indikasi multikolinearitas (VIF < 2). Oleh karena itu, model regresi perlu disesuaikan untuk mengurangi efek multikolinearitas agar hasil estimasi menjadi lebih reliabel.

#### 2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

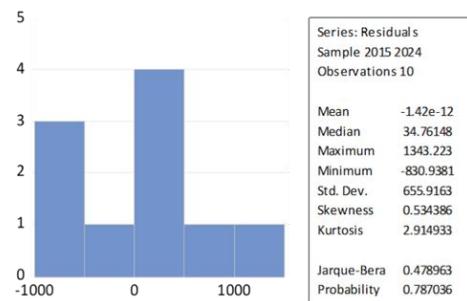
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.343279	Prob. F(4,5)	0.3702
Obs*R-squared	5.179848	Prob. Chi-Square(4)	0.2693
Scaled explained SS	1.239883	Prob. Chi-Square(4)	0.8715

*Sumber: Hasil pengujian asumsi klasik dengan EViews 12, data sekunder APBD Provinsi Kalimantan Tengah (2015–2024).*

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Breusch Pagan Godfrey menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,3702 (> 0,05), serta nilai probabilitas Obs\*Rsquared sebesar 0,2693 (> 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi bersifat homoskedastik, atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model. Dengan terpenuhinya asumsi ini, maka varians residual antar pengamatan dianggap konstan, dan model dapat digunakan untuk analisis inferensial tanpa perlu transformasi tambahan.

### 3. Uji Normalitas



Gambar Uji Normalitas

Sumber: Hasil output uji normalitas residual menggunakan EViews 12, data keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015–2024.

Berdasarkan hasil uji normalitas residual dengan menggunakan metode Jarque–Bera, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,7870 ( $> 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa distribusi residual bersifat normal. Nilai skewness sebesar 0,534 dan kurtosis 2,915 juga mendekati karakteristik distribusi normal. Dengan demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik normalitas, sehingga hasil uji statistik yang diperoleh dapat dianggap sah untuk dianalisis lebih lanjut.

### 4. Uji Autokorelasi

Tabel Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.164260	Prob. F(2,3)	0.2619
Obs*R-squared	5.906404	Prob. Chi-Square(2)	0.0522

Sumber: Hasil olahan peneliti menggunakan EViews 12, berdasarkan data belanja modal, PAD, dan indikator ekonomi Kalimantan Tengah (2015–2024).

Hasil uji autokorelasi dengan metode Breusch–Godfrey menunjukkan bahwa nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,2619 dan nilai probabilitas Obs\*R-squared sebesar 0,0522, keduanya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi, sehingga hubungan antar residual bersifat acak dan tidak saling memengaruhi. Dengan terpenuhinya asumsi ini, model dapat dikatakan layak dan valid untuk digunakan dalam pengujian regresi berganda.

### 5. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel Uji Regresi Linear Berganda (OLS Method)

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 12/19/25	Time: 00:04			
Sample: 2015 2024				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6650.976	1542.805	4.310964	0.0076
X1	-2.535838	0.564896	-4.489037	0.0065
X2	3.097555	0.658446	4.704342	0.0053
X3	1.870789	0.127103	14.71865	0.0000
X4	-308.4346	126.1840	-2.444324	0.0583
R-squared	0.979342	Mean dependent	5496.585	
Adjusted R-squared	0.962815	S.D. dependent var	4563.519	
S.E. of regression	880.0040	Akaike info criterion	16.70458	
Sum squared resid	3872036.	Schwarz criterion	16.85588	
Log likelihood	-78.52291	Hannan-Quinn criter.	16.53862	
F-statistic	59.25801	Durbin-Watson stat	1.570525	
Prob(F-statistic)	0.000212			

Sumber: Hasil estimasi regresi linear berganda menggunakan EViews 12, data fiskal dan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015–2024.

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat (TKDD), Transfer Antar Daerah (TAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2015–2024.

#### **Uji Simultan (F)**

Nilai F-statistic sebesar 59.258 dengan Prob(F-statistic) = 0.000212 < 0.05, menunjukkan bahwa secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya, PAD, TKDD, TAD, dan PDRB secara bersama-sama memengaruhi besarnya alokasi belanja modal daerah.

#### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai R-squared = 0.9793 dan Adjusted R-squared = 0.9628 menunjukkan bahwa 96,28% variasi belanja modal dapat dijelaskan oleh PAD, TKDD, TAD, dan PDRB, sedangkan sisanya 3,72% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data panel selama periode 2015–2024, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer Pemerintah Pusat (TKDD), Transfer Antar Daerah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Model penelitian telah memenuhi seluruh uji asumsi klasik dan menunjukkan kemampuan penjelasan yang sangat kuat terhadap variasi belanja modal.

Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah mendorong alokasi belanja pembangunan. Transfer Pemerintah Pusat juga berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, menandakan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer. Transfer Antar Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sehingga perannya dalam mendorong pembangunan daerah masih terbatas. Sementara itu, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mendukung peningkatan kapasitas belanja pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dipengaruhi oleh kombinasi faktor fiskal dan ekonomi, dengan dominasi dana transfer pusat dan masih terbatasnya kemandirian fiskal daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anjani, N., Masnila, & Yanto, R. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 16(1), 45–58.
- Aritenang, A. F. (2020). The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 25(3), 512–530. <https://doi.org/10.1080/13547860.2020.1718731>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. (2015–2024). Kalimantan Tengah dalam Angka (Seri Tahunan). Palangka Raya: BPS Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dinca, G., Marius, S. D., & Catalina, P. (2016). Analyzing fiscal balance evolution for developed and emerging countries. *Scientific Annals of Economics and Business*, 63(3), 299–309. <https://doi.org/10.1515/saeb-2016-0123>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). (2015–2024). Laporan Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Elida, N. (2013). Kemandirian Fiskal Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 115–129.
- Febrianti, I. R., Sasana, H., & Destiningsih, R. (2021). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi

- terhadap Keseimbangan Fiskal di Southern and Eastern Europe Tahun 2009–2017. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 21(2), 141–154. <https://doi.org/10.23917/jep.v21i2.14782>
- Hakim, A., Wibowo, D., & Iqbal, M. (2025). Determinants of Capital Expenditure in Regional Governments: Fiscal and Economic Perspectives. *Jurnal Keuangan Daerah dan Pembangunan*, 7(1), 25–39.
- Hardiningsih, P., & Oktaviani, R. M. (2018). Regional capabilities, transfers, and area influence to capital expenditures with moderation of economic growth. *Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(3), 355–372. <https://doi.org/10.33312/ijar.412>
- Hofman, B. (2006). The challenges of fiscal decentralization in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 42(3), 347–368. <https://doi.org/10.1080/00074910601053384>
- Iskandar, A., & Saragih, R. (2019). Regional government spending efficiency in the decentralization era: Evidence from Indonesia. *Info Artha*, 3(2), 85–98. <https://doi.org/10.31092/iar.v3i2.675>
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(12), 1841–1852. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Lubis, M. (2015). Fiscal decentralization and capital expenditure efficiency in Indonesian local governments. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 101–112.
- Manurung, M. (2009). Analisis Keberadaan Utang Indonesia dan Dampak Defisit Anggaran terhadap Keberlanjutan Fiskal. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 2(1), 25–58.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Muzdalifah, I. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Modal di Kalimantan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 5(1), 59–74.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Takahata, J., Dartanto, T., & Khoirunurrofik, K. (2021). Intergovernmental transfers in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 38(2), 250–272. <https://doi.org/10.1355/ae38-2e>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston, MA: Pearson Education.